

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam mengatur urusan pemerintahan daerah otonomnya, termasuk dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didelegasikan oleh kepala daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Adanya peran tersebut membuat pemerintah daerah memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan APBD tiap periodenya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk akuntabilitas keuangan daerah. Maka dari itu, penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 secara akrual. Karakteristik kualitatif tersebut yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Peraturan Pemerintah RI, 2010).

BPK akan memberikan opini atas audit LKPD yang telah dilakukan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Namun, sebelum LKPD diberikan kepada BPK untuk diaudit, terlebih dahulu akan dilakukan reвью oleh inspektorat daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (Peraturan

Pemerintah RI, 2008). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, reviu diartikan sebagai prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik. Reviu dilakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan (Permendagri RI, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015, tujuan reviu LKPD adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD yang telah dibuat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan, 2008). Selain itu, reviu dilaksanakan untuk memastikan bahwa LKPD telah memenuhi PP Nomor 60 Tahun 2008 terkait dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Maka dari itu, reviu LKPD menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena dapat mempengaruhi kualitas keandalan laporan keuangan daerah yang berdampak terhadap opini dari BPK.

Sehubungan dengan pentingnya reviu dari inspektorat daerah sebelum LKPD diaudit oleh BPK, penulis tertarik untuk menganalisis reviu LKPD Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten. Penulis ingin mengetahui apakah reviu yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan reviu LKPD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2018. Selanjutnya apabila terdapat perbedaan, penulis akan mencari tahu penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Selain itu, penulis juga ingin menganalisa permasalahan yang dialami oleh Inspektorat Kabupaten Klaten dalam melakukan reviu LKPD Tahun 2018-2020 dan tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menyusun Karya

Tulis Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS ATAS REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018-2020 OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

- 1) Standar apakah yang digunakan Inspektorat Kabupaten Klaten dalam melakukan reviu LKPD Tahun 2018-2020?
- 2) Bagaimana proses reviu laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2020?
- 3) Apakah proses reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini?
- 4) Permasalahan apakah yang ditemukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2020?
- 5) Apakah hasil reviu oleh Inspektorat Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2020 telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait secara memadai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis yang ingin dicapai dari penyusunan dari penyusunan KTTA ini, antara lain:

- 1) Mengetahui standar yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten dalam melakukan reviu LKPD Tahun 2018-2020.
- 2) Mengetahui proses reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2020.

- 3) Mengetahui apakah proases reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2020 telah sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini.
- 4) Mengetahui permasalahan yang ditemukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten dari Tahun 2018-2020.
- 5) Mengetahui tindak lanjut dari hasil reuiu yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan karya tulis ini berfokus pada analisa kesesuaian atas reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 terkait pelaksanaan reuiu atas Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Penulis menyadari dalam pembuatan karya tulis ini, terdapat keterbatasan dalam hal pengambilan data dan hal lainnya. Maka dari itu, penulis membatasi ruang lingkup masalah yang dibahas, yaitu standar yang digunakan Inspektorat Kabupaten Klaten dalam melakukan reuiu LKPD Tahun 2018-2020 dan proses reuiu LKPD untuk Tahun 2018 hingga Tahun 2020. Penulis akan membandingkan proses reuiu yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Klaten dengan peraturan yang berlaku saat ini, dan jika terdapat ketidaksesuaian maka penulis akan mencari penyebab timbulnya perbedaan tersebut. Penulis juga ingin mengetahui permasalahan yang temukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten dari Tahun 2018-2020 dan tindak lanjut hasil reuiu yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Klaten selama periode tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang penulis harapkan dengan adanya penyusunan KTTA ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis, penulisan karya tulis ini sebagai implementasi ilmu mata kuliah yang berkaitan dengan audit dan dapat menambah wawasan terkait proses reviu LKPD yang dilakukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten.
- 2) Bagi pembaca, penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait analisis reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membahas analisis reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh inspektorat daerah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika penulisan KTTA yang penulis susun adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, dijelaskan mengenai latar belakang penulis mengangkat topik yang digunakan dalam karya tulis ini. Selanjutnya penulis akan menjabarkan rumusan masalah untuk memberikan gambaran terkait hal apa saja yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Penulis juga akan menguraikan tujuan penulis membuat karya tulis ini dan menjelaskan ruang lingkup penulisan yang menjadi batasan dalam pembahasan karya tulis ini. Setelah itu, penulis akan menjabarkan manfaat penulisan dari karya tulis ini lalu dilanjutkan dengan

menjelaskan metode apa saja yang penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pembuatan karya tulis ini. Di bagian ini pula akan dijabarkan terkait sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan berbagai teori yang melandasi topik yang dibahas dalam penulisan karya tulis yang berasal dari penelitian dengan topik yang sama maupun dari sumber referensi lain. Landasan teori nantinya menjadi dasar dalam melakukan pembahasan topik pada karya tulis ini. Teori tersebut berupa reviu LKPD, peraturan yang mendasari pelaksanaan reviu LKPD sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan teori lain yang relevan dalam pembahasan karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis menjelaskan metode yang digunakan untuk memperoleh data terkait topik yang dibahas, yaitu metode studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, pada bagian ini penulis juga akan memaparkan hasil pembahasan terkait standar reviu dan proses reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten dari Tahun 2018 hingga 2020, kemudian membandingkannya dengan proses reviu yang sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018. Apabila ditemukan perbedaan, maka penulis akan mencari tahu penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Penulis juga ingin mengetahui permasalahan yang ditemukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten dari Tahun 2018-2020 dan tindak lanjut hasil reviu yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Klaten selama periode tersebut.

BAB IV KESIMPULAN

Bagian ini berisi penutup penulisan karya tulis yang telah penulis buat. Penulis akan membuat kesimpulan dari hasil pembahasan atas analisis reuiu LKPD Kabupaten Klaten oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dari Tahun 2018 hingga tahun 2020. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan hasil pembahasan dari penulisan karya tulis ini.